

## KONFLIK KEPENTINGAN

2025

PERBUP SEMARANG NO.28, BD 2025/NO.28, 17 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

### ABSTRAK

- Salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pengelolaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mengelola konflik kepentingan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Peraturan Bupati Semarang tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERMENPANRB No.17 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jenis, sumber dan bentuk konflik kepentingan, pengelolaan konflik kepentingan Perangkat Daerah. Mekanisme Pengelolaan Konflik Kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 12 hlm.